

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, persaingan dunia bisnis semakin ketat dan kompetitif. Perusahaan terus-menerus mengembangkan usahanya agar semakin maju dan terbaik dengan berbagai macam kondisi dan tantangan yang dihadapi. Dunia bisnis dengan perusahaan yang semakin maju tersebut tentunya tidak begitu saja bebas melakukan tindakan apa saja dalam mencapai tujuannya. Hal ini harus disertai dengan adanya batasan seperti dibuatnya aturan atau undang-undang tegas yang berlaku. Dengan demikian, semua orang bisa mengetahui letak tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan. Tidak hanya hak saja yang dijalankan oleh perusahaan, tetapi kewajiban juga harus dijalankan, sehingga kehidupan manusia di bumi ini menjadi seimbang. Salah satu contoh kewajiban yang saat ini sedang mulai coba dijalankan oleh beberapa perusahaan yaitu pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi suatu perwujudan perusahaan dalam keikutsertaan proses pembangunan keberlanjutan. Global Reporting Initiative-GRI (2006) menyatakan bahwa, “Tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka.” Segala kegiatan maupun aktivitas perusahaan terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan diungkapkan dalam suatu pelaporan yang dikenal dengan

sustainability reporting. *Sustainability reporting* diharapkan menjadi alat pendukung atas keberlangsungan hidup bagi perusahaan dan bumi.

Penerapan *sustainability reporting* saat ini di Indonesia mulai berkembang dan masih sedikit yang melaksanakannya (Suryono dan Prastiwi, 2011). Adanya penerapan *sustainability reporting* ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik internal maupun eksternal. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan oleh berbagai pihak untuk lebih transparansi dan akuntabilitas. Apabila transparansi dan akuntabilitas tercapai, maka timbullah sebuah kepercayaan, di mana kepercayaan merupakan salah satu kunci kesuksesan bagi perusahaan. Hasil kesuksesan yang diperoleh tersebut ialah pandangan yang positif dari *stakeholders*, kemudian pandangan tersebut menjadi sumber kekuatan bagi perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan berkesinambungan atau berkelanjutan.

Tuntutan terhadap penerapan *sustainability reporting* tersebut muncul karena adanya isu utama yang selalu diperdebatkan di berbagai kalangan masyarakat yaitu isu mengenai “*Green Concern*” dan “*Social Concern*” (Dewi, Irianto, dan Sukoharsono, 2011). Isu “*Green Concern*” dan “*Social Concern*” ini terkait dengan berbagai macam kasus pencemaran lingkungan bagi kehidupan sosial manusia (Dewi, dkk., 2011). Contoh kasus pencemaran lingkungan yang pernah terjadi di Indonesia antara lain PT Timah Tbk. di Pulau Bangka Belitung terkait dengan penambangan timah konvensional tak berizin oleh rakyat karena mengejar target setoran (Ambadar, 2008; dalam Anatan, 2010), PT Freeport Indonesia terkait dengan pembuangan limbah yang besar

kapasitasnya sehingga Danau Wanagon jebol sampai tiga kali (Rudito dan Famiola, 2007; dalam Anatan, 2010), dan PT Lapindo Brantas Inc. terkait dengan kecerobohan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya lumpur panas di Porong (Anatan, 2010). Kasus-kasus seperti inilah yang menjadi pusat perhatian perusahaan untuk mengevaluasi lebih seksama terhadap semua aktivitas dan kegiatan yang dijalankan di lingkungannya dan cara pengelolaan sumber daya yang benar dan tepat. Selain itu, perusahaan dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada *stakeholders*.

Tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*-CSR) saat ini di Indonesia sudah merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan untuk dilaksanakan, di mana peraturan dan kebijakan pengungkapan CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Pasal 74 Tahun 2007. UU Nomor 40 Pasal 74 Tahun 2007 menegaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*-CSR) dan lingkungan wajib dijalankan oleh Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Adanya peraturan tersebut dapat membuat perusahaan bertahan dalam jangka waktu yang panjang.

Kebutuhan informasi tentang kinerja dan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi kebutuhan yang penting bagi *stakeholders* untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. Segala informasi yang dibutuhkan tersebut diungkapkan dalam suatu laporan yang saat ini lebih dikenal dengan *sustainability report* (laporan keberlanjutan). *Sustainability report* terdapat kegiatan CSR dan kebijakan

ekonomi, sehingga berbeda dengan laporan CSR yang terdapat di laporan tahunan perusahaan yang hanya berisi kebijakan lingkungan dan sosial saja. Tujuan dari *sustainability report* ialah untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang, sehingga baik perusahaan dan *stakeholders* akan memperoleh manfaat yang berarti dan berguna. Di tambah pula *sustainability report* dapat memberikan informasi secara utuh dan terintegrasi kepada *stakeholders*. Jadi tidak hanya laporan keuangan saja yang menjadi sumber informasi yang penting dan perhatian khusus saat ini oleh para *stakeholder* dan *shareholder* dalam pengambilan keputusan, melainkan *sustainability report* juga dapat digunakan sebagai alat dalam pengambilan keputusan yang tepat.

GRI (2006) menyatakan bahwa, “Laporan keberlanjutan adalah praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.” Berdasarkan peraturan BAPEPAM Nomor KEP-431/BL/2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, *sustainability report* merupakan pelaporan yang bersifat wajib dan dapat disajikan dalam laporan tahunan atau terpisah dari laporan tahunan. Penyusunan *sustainability report* dapat menjelaskan informasi CSR yang bernilai tambah sebab terdapat prinsip dan standar pengungkapan yang mampu mencerminkan tingkat aktivitas perusahaan secara menyeluruh, serta alat pengukuran terhadap kinerja perusahaan (Widiyanto, 2011). Terbitnya *sustainability report* yang berdasarkan standar *The Global Reporting Initiative* (GRI) dapat menciptakan etika dalam dunia bisnis

yang lebih baik dan sehat, serta perusahaan berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.

The Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah organisasi non-profit yang didirikan pada tahun 1987 dan bergerak di bidang keberlanjutan. GRI yang memelopori *sustainability report* di seluruh dunia telah mengembangkan “*framework for sustainability reporting*” dan pedoman pelaporan keberlanjutan versi terakhir bernama *G3 Guidelines* (Dilling, 2010; dalam Suryono dan Prastiwi, 2011). Ada beberapa tipe standar pelaporan yang disyaratkan oleh GRI bagi perusahaan antara lain profil organisasi, indikator kinerja, dan pendekatan manajemen (Suryono dan Prastiwi, 2011). *Sustainability report* saat ini mulai dipublikasikan oleh beberapa perusahaan di Indonesia sebagai dasar bentuk tanggung jawab dan salah satu strategi perusahaan. Dengan demikian, informasi yang terkandung dapat mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya dan bisa menciptakan kesinambungan perusahaan dalam berbagai aspek, baik aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Praktik pengungkapan *sustainability report* di Indonesia mengalami beberapa kendala yang membuat beberapa perusahaan masih belum melakukan pengungkapan tersebut. Hal tersebut disebabkan tidak adanya *single definition* dari *sustainability reporting* yang mampu diterima secara global, maupun bagaimana seharusnya bentuk format dari *sustainability report* itu sendiri menjadi alasan utama setiap perusahaan tidak mau melakukan pengungkapan (Dilling, 2010; dalam Widiyanto, 2011), akibatnya terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam

menentukan apa yang harus dipublikasikan dalam *sustainability report*, bagaimana mengukur dan mengklasifikasikan informasi yang ada, sanksi apa yang akan diterima oleh perusahaan apabila tidak sesuai dengan standarnya, dan kepada siapakah seharusnya *sustainability report* ditujukan (Luthfia, 2012).

Berbagai teori yang melandasi praktik pengungkapan *sustainability report* dalam penelitian ini antara lain teori *stakeholders* dan teori legitimasi. Teori *stakeholders* menjelaskan bahwa pihak-pihak yang mempunyai kepentingan pada perusahaan (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya) dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk memberikan manfaat kepada *stakeholders*. Sedangkan teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya harus berdasarkan norma-norma masyarakat agar aktivitas perusahaan yang dilakukan menjadi sah atau legal di mata masyarakat.

Adanya fenomena pelaporan *sustainability report* yang masih hangat diperbincangkan membuat beberapa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Penelitian awal dilakukan oleh Kolk (2003) dengan pendekatan kuantitatif (Suryono dan Prastiwi, 2011). Selanjutnya penelitian Kolk dikembangkan oleh Dilling (2010) yang meneliti perbedaan antara perusahaan yang membuat *sustainability report* dengan yang tidak, berdasarkan karakteristik perusahaan (jenis sektor operasi, kinerja keuangan, pertumbuhan jangka panjang, *corporate governance*, dan lokasi perusahaan-perusahaan tersebut didirikan). Penelitian

terdahulu yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *sustainability report* adalah Suryono dan Prastiwi (2011), Kamil dan Herusetya (2012), Nur dan Priantinah (2012), Aulia dan Syam (2013), Fitri (2013), dan Sari dan Marsono (2013).

Berdasarkan penelitian Suryono dan Prastiwi (2011), peneliti ingin menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Faktor-faktor tersebut antara lain profitabilitas, *leverage*, aktivitas, ukuran perusahaan, komite audit, dan dewan direksi. Profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba (Murhadi, 2013:63). Hasil penelitian Suryono dan Prastiwi (2011) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik pengungkapan *sustainaibility report*. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi akan mengungkapkan informasi kepada *stakeholders* tersebut karena perusahaan ingin mempertahankan dukungan dan memperoleh keyakinan dari *stakeholders* melalui pengungkapan *sustainability report*, sehingga *stakeholders* akan memperoleh manfaat dan kepentingan ekonomi atau finansial perusahaan pun dapat terpenuhi. Namun hasil penelitian Suryono dan Prastiwi (2011) tidak mendukung dengan hasil penelitian Kamil dan Herusetya (2012) serta Aulia dan Syam (2013) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability reporting*.

Leverage didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam mendanai utangnya (Brigham dan Houston, 2010:140). Menurut Suryono dan Prastiwi (2011), perusahaan yang mengungkapkan informasi *leverage* dan tingkat *leveragenya* tinggi, maka akan membuat

stakeholders tidak mau berinvestasi pada perusahaan, sebab hal tersebut menjadi sinyal buruk bagi *stakeholders*. Selain itu, perusahaan mungkin akan mengurangi tingkat pengungkapan *sustainability report*, sehingga akibat yang diperoleh ialah pengaruh dan dukungan dari *stakeholder* menjadi menurun terhadap perusahaan. Hasil penelitian Suryono dan Prastiwi (2011), Aulia dan Syam (2013), dan Sari dan Marsono (2013) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*, tetapi berbeda dengan hasil penelitian Nur dan Priantinah (2012) yang menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR, dimana pengungkapan CSR tersebut menggunakan indikator dari GRI dengan jumlah 79 item pengungkapan.

Aktivitas didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam mengelola semua aktivitya secara efektif (Brigham dan Houston, 2010:136). Hasil penelitian Suryono dan Prastiwi (2011) menemukan bahwa tingkat aktivitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hal ini disebabkan karena aktivitas bukan merupakan faktor yang dipertimbangkan oleh manajemen dalam pengungkapan *sustainability report*.

Skala atau ukuran perusahaan didefinisikan dengan menggunakan berbagai kriteria seperti jumlah karyawan, volume penjualan, dan nilai aktiva (Longenecker, Moore, dan Petty, 2001:16). Hasil penelitian Suryono dan Prastiwi (2011) dan Kamil dan Herusetya (2012) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hal ini disebabkan menurut Suryono

dan Prastiwi (2011), ukuran perusahaan yang semakin besar, maka akan semakin diperhatikan oleh *stakeholders* dan perusahaan akan berkepentingan dalam mengungkapkan informasinya secara luas untuk memperoleh legitimasi dan memperjelas tujuan dari perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian Sari dan Marsono (2013) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Komite audit merupakan komite yang membantu dewan komisaris dalam pengawasan secara menyeluruh (Sawyer, Dittenhofer, dan Scheiner, 2006:511). Komite audit yang melakukan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan anggaran dasar perusahaan sesuai dengan BAPEPAM Nomor Kep-24/PM/2004, maka implementasi *corporate governance* menjadi semakin baik, sehingga informasi yang diungkapkan semakin luas dan perusahaan memperoleh legitimasi. Hasil penelitian Suryono dan Prastiwi (2011) menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*, sedangkan hasil penelitian Fitri (2013) tidak menemukan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR tersebut menggunakan indikator dari GRI, di mana GRI merupakan suatu organisasi yang membuat kerangka pelaporan *sustainability reporting*.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa, “Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.” Dalam penelitian Suryono dan Prastiwi (2011) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif dengan pengungkapan *sustainability report*. Apabila frekuensi rapat antara anggota dewan direksi tinggi, maka indeks *corporate governance* menjadi semakin tinggi karena terjalannya komunikasi dan koordinasi yang sering. Hal inilah yang akan membuat pengungkapan informasi perusahaan dalam *sustainability report* semakin tinggi dan luas karena perusahaan ingin menunjukkan kinerjanya yang baik kepada *stakeholders*. Kemudian pandangan *stakeholders* terhadap perusahaan menjadi kuat dan positif. Namun Sari dan Marsono (2013) yang meneliti mengenai pengaruh kinerja keuangan, ukuran perusahaan, dan *corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report* menghasilkan hasil bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Pada penelitian ini, aspek-aspek yang terkandung dalam *sustainability report* yang akan digunakan adalah aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian untuk periode *sustainability report* yang akan digunakan dari perusahaan yang menerbitkannya adalah tahun 2010-2012. Alasannya karena peneliti ingin melanjutkan penelitian terdahulu, menggali lebih dalam tentang praktik pengungkapan *sustainability report*, dan mencari untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih kuat sehingga bisa mengetahui bagaimana perkembangannya di Indonesia sampai pada tahun 2012. Selain itu, hal tersebut disebabkan karena periode tersebut mengindikasikan kondisi yang masih relatif baru,

sehingga hasil penelitian yang diharapkan akan lebih relevan dengan kondisi di Indonesia.

Objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan jasa yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dan menerbitkan *sustainability report*, karena antara perusahaan jasa dengan perusahaan yang lainnya memiliki karakteristik yang berbeda sehingga hasil penelitian yang akan diperoleh dapat menjadi tidak relevan. Selain itu, tidak hanya perusahaan-perusahaan manufaktur dan pertambangan saja yang sadar akan tanggung jawab sosial dan lingkungan, melainkan saat ini mulai banyak dari perusahaan-perusahaan jasa yang sadar akan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga mereka mulai mencoba bertahap untuk mengimplementasikan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui *sustainability report*. Serta belum ada penelitian yang mengadakan studi empiris pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI, sehingga peneliti tertarik untuk menggunakan perusahaan-perusahaan jasa sebagai objek penelitian ini.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Apakah profitabilitas, *leverage*, aktivitas, ukuran perusahaan, komite audit, dan dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk meneliti dan menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, aktivitas, ukuran perusahaan, komite audit, dan dewan direksi terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik, yaitu dapat digunakan sebagai acuan dan perbandingan bagi pihak lain untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama, serta dapat menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi mahasiswa tentang pengungkapan *sustainability report*.
2. Manfaat Praktik, yaitu dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pertimbangan bagi perusahaan dalam penentuan kebijakan *sustainability report*; sebagai dasar pertimbangan bagi *shareholder* dalam pengambilan keputusan berinvestasi dan referensi mengenai informasi dan pengetahuan; dan sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam penetapan dikeluarkannya aturan atau undang-undang yang terkait dengan pengungkapan *sustainability report* di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas penelitian terdahulu, landasan teori yang berhubungan dengan penelitian ini, pengembangan hipotesis, dan model analisis penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang karakteristik obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.